



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 28 April 2017

Halaman: 9

ANTISIPASI KEGIATAN MENUMPUK AKHIR TAHUN

Proyek Fisik Harus Masuk Lelang

YOGYA (KR) - Memasuki triwulan kedua, seluruh proyek fisik yang nilainya di atas Rp 200 juta diimbau segera masuk proses pelelangan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kegiatan yang menumpuk di akhir tahun. Akibatnya, waktu yang tersedia semakin terbatas serta kualitas proyek kurang terjamin.

"Dari pengalaman tahun lalu, maka pola pengawasan antara legislatif dengan eksekutif mulai diubah. Khusus di Komisi C sudah ada kesepakatan dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) untuk memasukkan lelang di awal tahun. Makanya, komitmen itu kami pertanyakan kembali," urai Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya Bambang Seno Baskoro, Kamis (27/4).

Menurut Bambang, hingga akhir triwulan pertama pada Maret lalu, ternyata belum semua proyek fisik berhasil diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dari pengawasan yang dilakukannya, ada beberapa dokumen yang masih perlu dibenahi. Selain itu, dampak perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) per 1 Januari 2017 juga turut berpengaruh terhadap kinerja.

Kendati demikian, Bambang berharap tata kala rencana kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Terutama menyangkut tahapan lelang yang disesuaikan dengan target. "Masuk triwulan kedua sejak awal April lalu, maka PUPKP selaku pengampu kegiatan fisik harus sudah memasukkan berkas lelang. Jadi, akhir triwulan kedua, semua proyek sudah

ada pemenang," imbuhnya.

Di samping itu, kendala selama proses lelang juga harus diperhatikan. Terutama jika terjadi kurang peserta hingga gagal lelang atau masa sanggah, maka durasi pelelangan bisa semakin lama. Apalagi jika sampai tiga kali mengalami gagal lelang, otomatis proyek tersebut tidak bisa digulirkan tahun ini.

Sementara itu, hingga akhir triwulan pertama baru 59 paket pekerjaan yang masuk lelang. Dari jumlah tersebut, saat itu terdapat 39 paket yang sudah diselesaikan atau muncul pemenang lelang. Sedangkan paket pekerjaan yang harus lelang mencapai hampir seratus paket.

Penjabat Walikota Yogya Sulistiyo mengaku sudah mendesak setiap OPD untuk segera memasukkan lelang paket pekerjaan pada triwulan kedua. Pasalnya anggaran sudah dialokasikan dalam APBD sehingga selaku pengguna anggaran maka OPD memiliki tanggungjawab.

"Sudah ada surat edaran dari Sekda untuk percepatan kinerja. Perombakan OPD tidak boleh dijadikan alasan. Kalau nanti ada kegiatan yang tidak terlaksana, berarti serapan anggaran rendah. Masyarakat yang akan dirugikan," paparnya. (Dhi)-

Instansi

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005